

Judul : Prabowo usul dokumen Sishankamrata jadi UU
Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Prabowo Usul Dokumen Sishankamrata Jadi UU

■ RONGGO ASTUNGKORO,
FAUZIAH MURSID

JAKARTA — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengusulkan dokumen strategis hasil Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dijadikan undang-undang (UU). Menurut dia, payung hukum dan produk strategis tentang Sishankamrata yang ada saat ini sudah usang.

Prabowo mengatakan, produk Sishankamrata yang ada saat ini merupakan produk periode 1960-1970. Menhan menegaskan, perunya aktualisasi terhadap payung hukum Sishankamrata. Payung hukum dan produk terkait sishankam-

rata perlu disesuaikan dengan kebutuhan abad ke-21. Menhan menyebut, Konferensi Nasional Sishankamrata Abad 21 dilakukan untuk menghasilkan dokumen strategis itu.

Setelah berjalan, dan juga telah dipelajari dan koreksi dokumen strategis tersebut, Prabowo menilai, produk yang dihasilkan sudah aktual dengan kondisi abad ke-21 dan menampung dan menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku, pelaksana-pelaksana, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pertahanan negara di lapangan," kata Prabowo dalam sambutannya pada penutupan Konferensi Sishankamrata di Universitas Pertahanan, Sentul,

Jumat (18/6).

Menhan mengusulkan agar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk membuat dokumen strategis itu menjadi suatu UU. Hal itu, dia menilai, perlu dilakukan dengan harapan produk tersebut dapat dijadikan pegangan semua institusi dan lembaga negara. "Disarankan bahwa produk ini dapat berbentuk atau dapat diolah menjadi undang-undang bagi negara kita. Sehingga, produk ini dapat digunakan sebagai pegangan oleh semua institusi dan semua lembaga-lembaga kenegaraan," ujar dia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan, hasil konferensi Sishankamrata bisa diimplementasikan dalam kerangka

penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan yang adaptif. "Apa yang telah dihasilkan diharapkan menjadi langkah strategis untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada terkait pertahanan dan keamanan negara," tuturnya saat menutup Konferensi Nasional Sishankamrata di Sentul, Jumat.

Wapres juga berharap dokumen hasil konferensi yang bernilai strategis ini bisa mendorong gerakan berskala nasional. Khususnya, untuk mengoptimalkan implementasi Sishankamrata menghadapi ancaman terhadap NKRI pada abad ke-21. "Saya minta agar apa saja yang sudah dirumuskan tersebut, jangan sampai hanya menjadi dokumen di atas meja, namun dapat diimplementasikan

dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi NKRI," katanya.

Selain itu, ia meminta agar modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista tetap mengacu pada target pemenuhan MEF (*minimum essential force*). Wapres menyampaikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Regulasi ini dikeluarkan untuk mendukung pemenuhan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara.

"Guna memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan TNI sebagai komponen utama," katanya.

■ ayus@raharp.com